

UNTUK MAJUKAN SEKTOR PERDAGANGAN

Kemendag Siapkan Tiga Program

SUKOHARJO (KR) - Kementerian Perdagangan menyiapkan tiga program untuk memajukan sektor perdagangan di Indonesia. Salah satu penekanannya yakni menjaga kualitas agar tidak kalah dengan barang impor.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mengungkapkan hal itu saat berkunjung di pabrik mebel PT Mulya Abadi Indocarpentry di Dukuh Ngemul Desa Sidorejo Kecamatan Bendosari Sukoharjo, Kamis (31/10). Menurutnya, tiga program di antaranya mengamankan pasar dalam negeri. Caranya kita harus mempunyai daya saing, karena selama ini kalah dengan barang impor yang mempunyai kualitas lebih bagus.

Budi Santosa menjelaskan, daya saing di dalam negeri membuat daya saing di Indonesia lemah. Sebab, persaingan barang justru dimiliki oleh produk impor yang masuk ke Indonesia.

Karena itu, produk dari dalam negeri wajib menjaga kualitas agar mampu bersaing.

Program kedua, perluasan pasar ekspor. Sekarang akan menyelesaikan kerja sama bilateral dengan Kanada, Peru dan Rusia. Diharapkan dalam tiga bulan ke depan bisa selesai. Tujuannya untuk memperluas akses pasar produk Indonesia.

Kementerian Perdagangan juga menyiapkan program ketiga, yakni melakukan peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Ekspor. "Target Desa Ekspor

ke suatu negara harus jelas totalnya berapa. Kemudian di dalamnya target ekspor untuk UMKM sendiri berapa," ungkap Budi Santoso.

Menurutnya, hal itu penting sebagai upaya memajukan UMKM ke jenjang *go global* sesuai target. Berdasarkan data diketahui, kewirausahaan di Indonesia baru 3,47 persen, sedangkan untuk

menjadi negara maju syaratnya adalah 10 sampai 12 persen.

Kementerian Perdagangan juga mendorong sektor perdagangan seperti UMKM yang sudah siap ekspor bisa merealisasikan eksportnya. Terpenting juga UMKM melakukan pengembang-

an pasar dalam negeri. "Kita punya lebih dari 40 keterwakilan perdagangan di luar negeri. Itu tugasnya adalah bagaimana memasarkan produk-produk Indonesia khususnya produk UMKM ke sana," tandas Budi Santoso. **(Mam)-f**



KR-Wahyu Imam Ibad
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso saat mengunjungi pabrik mebel di Dukuh Ngemul Desa Sidorejo Kecamatan Bendosari Sukoharjo.

DIDUGA ABAIKAN PELANGGARAN KODE ETIK

KPU Banyumas Terancam Dipanggil DKPP

PURWOKERTO (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas berpotensi dipanggil oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kasus dugaan pelanggaran kode etik itu ketika seorang anggota PPK di Kecamatan Wangon diketahui menghadiri deklarasi pasangan calon gubernur.

Komisioner Bawaslu Banyumas, Yon Daryono mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Banyumas untuk menindak tegas pelanggaran tersebut. Namun, hingga kini rekomendasi

tersebut belum sepenuhnya dijalankan. Yon, menegaskan kehadiran anggota PPK dalam acara deklarasi dianggap sebagai pelanggaran kode etik, mengingat posisi mereka sebagai penyelenggara pemilu harus netral. "Rekomendasi Bawaslu jelas, yaitu memberhentikan tetap anggota PPK tersebut. Namun, KPU masih membiarkannya aktif dengan alasan masih akan melakukan penelusuran," kata Yon Daryono, Jumat (1/11). Selain itu, Bawaslu Banyumas juga menemukan kasus kedua, yaitu seorang anggota PPS di Desa Sokaraja Lor yang diduga masih menjadi anggota partai politik.

Berdasarkan aturan pemilu, lanjut Yon Daryono, anggota partai politik tidak diperbolehkan

menjadi penyelenggara pemilu demi menjaga netralitas. Hasil pemeriksaan Bawaslu terkonfirmasi bahwa anggota PPS tersebut memang aktif dalam partai politik. "Meski terbukti, KPU hanya memberikan sanksi pembinaan dan anggota PPS itu masih bertugas hingga kini," jelasnya.

Menurut Yon, langkah KPU Banyumas yang hanya memberikan sanksi ringan atau menunda tindakan tegas terhadap anggota penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Bawaslu menilai sikap ini sebagai bentuk pembiaran yang bertentangan dengan prinsip netralitas dalam pemilu.

Yon menegaskan bahwa setiap pelanggaran kode etik dalam proses pemilu harus ditindak sesuai peraturan. Oleh karena itu, Bawaslu telah menyampaikan rekomendasi resmi kepada KPU Banyumas agar kedua anggota tersebut diberhentikan. Mengingat KPU Banyumas belum melaksanakan rekomendasi tersebut, Bawaslu Banyumas mengindikasikan bahwa DKPP mungkin akan turun tangan untuk memeriksa KPU Banyumas.

Menurut Yon Daryono, hal itu menjadi sorotan publik karena peran KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen seharusnya selalu menjaga netralitas demi menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat dalam proses demokrasi. **(Dri)-f**



KR-Zaini Arrosyid

Salah satu tempat pemasangan APK di Temanggung yang menyalahi regulasi.

PEMASANGAN ATK DI TEMANGGUNG Ditemukan 1.382 Titik Pelanggaran

TEMANGGUNG (KR) - Bawaslu Kabupaten Temanggung menemukan 1.382 titik pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada kampanye Pemilihan 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung, Roni Nofriyadi mengatakan pelanggaran terbanyak terkait zonasi pemasangan, bukan pada materi.

"Temuan itu berdasar catatan hingga akhir November 2024. Kami sudah lakukan saran perbaikan kepada KPU, untuk dikomunikasikan kepada peserta pemilihan," kata Roni Nofriyadi, Jumat (1/11).

Dia mengatakan hasil komunikasi dengan KPU, akan dilakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti Satpol PP terkait pelanggaran Perda, Kepolisian untuk pengamanan, dan peserta pemilihan untuk perbaikan penempatan APK secara mandiri.

Menurutnya, pelanggaran yang paling banyak adalah kaitannya dengan ketertiban seperti dipaku di pohon dipasang di tiang listrik, trotoar jalan dan juga di APK yang menghalangi pandangan pengendara karena ini membahayakan keselamatan masyarakat. Ada pula APK yang dipasang di area perkantoran pemerintah.

"Diharapkan dari paslon itu sendiri lebih bijak dalam menempatkan APK, rekanan KPU dalam pemasangan APK diharapkan juga dapat membetulkan pemasangan sesuai ketentuan," kata Roni.

Dia mengatakan sejak awal kampanye Bawaslu melakukan inventarisir APK yang dipasang yakni berupa baliho, spanduk, maupun rontek atau umbul-umbul. Bawaslu akan terus menginventarisir APK, baik untuk beserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah maupun Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2024. "APK yang menyalahi aturan untuk dikomunikasikan pada stakeholder sehingga nanti pemasangannya bisa sesuai dengan regulasi yang berlaku," tandas Roni. **(Osy)-f**

HUKUM

POLRES BANTUL GALAKKAN OPERASI MIRAS 3 Pemuda Diamankan di Warung Sate

BANTUL (KR) - Tiga pemuda masing-masing ER (26) warga Berbah Sleman, EJ (34) warga Sandan Bantul dan EH (34) warga Bambanglipuro Bantul, diamankan petugas gabungan Polres Bantul, karena kedatangan membawa minuman keras (Miras) dan membuat resah warga.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffrey Prana Widnyana, Kamis (31/10), memaparkan penangkapan ketiga pelaku berawal saat petugas gabungan Satsamapta Polres Bantul dan Polsek Kretek saat melakukan razia mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di sebuah warung sate ada tiga anak muda yang sedang berulah dan mereka membawa botol berisi miras.

Kebetulan petugas yang sedang melakukan operasi Miras langsung datang ke warung sate dan benar di warung tersebut ada pemuda yang salah satunya sedang mententeng

botol berisi Miras. Petugas langsung mengamankan mereka. Selain mengamankan ketiga pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti satu botol miras. Mereka dibawa ke Polres Bantul untuk dilakukan pembinaan.

AKP Jeffrey mengatakan, Polres Bantul dan jajarannya sedang menggalakkan razia miras di wilayah hukumnya. Hal ini untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas dan kriminalitas yang disebabkan pengaruh miras. Sasaran razia adalah kafe-kafe dan juga warung-warung yang disinyalir menjual miras secara ilegal.

AKP Jeffrey juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam upaya pemberantasan Miras dengan melaporkan kepada polisi apabila di lingkungannya ada yang menjual miras. "Laporkan kepada polisi, bila ada yang jual miras di wilayahnya, pasti akan kami tindak lanjuti," terang Jeffrey. **(Jdm)-f**

JADI KORBAN PENGEROYOKAN DI YOGYA Kesehatan Santri Asal Pati Mulai Membaik

PATI (KR) - Mochamad Aful Maromi (23) santri asal Desa Pangungroyom, Kecamatan Wedarijaksa Pati, kini kondisinya semakin membaik. Sebelumnya, pemuda tersebut menjadi korban pengeroyokan segerombolan orang di Mantrijeron Yogyakarta, Rabu (23/10) malam lalu.

Saat berita ini diturunkan, sejumlah tokoh NU, Banser dan Ansor di Pati, banyak yang datang guna menjenguk Aful, yang 'nyantri' di Pondok Pesantren Al Munawwir, Krapyak Yogyakarta. "Saya tidak tahu apa-apa. Tapi saya menjadi korban salah sasaran," tutur Aful kepada para tamu yang menjenguknya.

"Alhamdulillah, kondisi kesehatan mas Aful semakin membaik dan bagus" ujar beberapa warga desa Pangungroyom, Kamis (31/10). Sebagaimana diberitakan, ribuan

santri dan berbagai elemen masyarakat di DIY menggelar aksi damai di Polda DIY, Selasa (29/10). Aksi ini dilakukan buntut penusukan dua orang santri di Mantrijeron Yogyakarta.

Sebelumnya, kasus penusukan tersebut terjadi pada Rabu (23/10) malam. Saat itu kedua korban, Aful bersama Shafiq Faskha (19) warga Rembang, tengah membeli sate di Jalan Parangtritis, Brontokusuman Mergangsan, tiba-tiba datang rombongan pelaku. Secara tiba-tiba, keduanya dikeroyok.

Akibat pengeroyokan tersebut, Shafiq mengalami luka robek pada perut bagian kiri dan luka memar di bagian kepala, tangan dan kaki, karena pukulan balok dan kursi. Sehingga harus mendapat tiga jahitan. Sementara Aful mengalami luka di kepala, tangan, dan kaki akibat pukulan benda keras. **(Cuk)-f**

MANIPULASI NASABAH UNTUK CAIRKAN PINJAMAN

Mantan Pegawai BRI Bobol Uang Rp 3,4 Miliar

WONOSARI (KR) - Pemimpin Cabang BRI Wonosari Kabupaten Gunungkidul, M Ismail Fahmi, mendatangi Polres melaporkan dugaan manipulasi dan pencatutan nama 80 warga Kapanewon Patuk untuk peminjaman uang di BRI dengan total senilai Rp 3,4 miliar.

Pencatutan nama ini melibatkan oknum pegawai BRI yang saat ini sudah tidak bekerja lagi di bank tersebut. "Kasus *fraud* (tindakan penipuan atau kecurangan dalam aktivitas bisnis yang melibatkan transaksi keuangan) ini kami laporkan kepolisian," jelas Fahmi dalam keterangan tertulis,

Kamis (31/10).

Sebelum dilaporkan, pihaknya menerima laporan dari 80 nasabah bank yang menjadi korban pencatutan nama. Mereka tidak merasa meminjam uang di bank, tapi mendapat tagihan dari BRI dengan Plafon pinjaman berbeda-beda, mulai dari Rp50 juta hingga Rp100 ju-

ta.

Warga yang merasa tidak meminjam uang mengaku bingung lantaran mendapat tagihan dan melapor ke pihak kalurahan atas kejadian tersebut. Pihak kalurahan lantas melaporkan kejadian ini ke Bank BRI. Atas kejadian ini, warga menanggung kerugian hingga total

Rp 3,4 miliar.

Pemimpin Cabang BRI Wonosari, M Ismail Fahmi, menjelaskan BRI telah memecat oknum mantri yang terlibat pencatutan nama warga Kapanewon Patuk Gunungkidul. Atas kejadian tersebut, BRI telah memberikan sanksi tegas berupa Pemutusan Hubungan Kerja oknum pekerja yang terlibat *fraud* tersebut.

"Oknum yang diduga terlibat sudah kami berhentikan dengan tidak hormat," kata Fahmi. **(Bmp)-f**

BUNTUT PENGANIAYAAN TERHADAP SANTRI

Razia Miras di Prawirotaman Tutup Outlet 23

YOGYA (KR) - Kasus penganiayaan dan penusukan terhadap 2 santri Ponpes Krapyak berbuntut razia minuman keras (miras) yang digeber di wilayah Prawirotaman, serta menutup total Outlet 23 dan dilakukan police line. Sebagai bagian dari Razia Miras Serentak yang di-

lakukan Polresta Yogya, Kamis (31/10).

"Sementara di City Grill Jalan Parangtritis berhasil menyita 344 botol beer beraneka merek dari pengelola Azkia Putri, serta di Bamboo Resto Jalan Prawirotaman Brontokusuman Mergangsan, berhasil menyita 63 botol miras beraneka

merek dari pengelola Hambarjan," tutur Kasi Humas Polresta Yogya, AKP Sujarwo, Jumat (1/11).

Razia miras serentak meliputi surat izin penjualan (NIB, SKPL, SKP) miras mulai pukul 09.35. "Razia di wilayah hukum Polsekta Mergangsan dipimpin langsung Kapolsek

Mergangsan, AKP Fitri Anto Heri Nugroho SH, dengan lebih kurang 20 orang dan di back up Polresta Yogyakarta, bersama dengan Satpol PP Kota Yogyakarta dipimpin Dodi Kabid Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta lebih kurang 1 SST," jelasnya.

Razia miras sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur No 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

"Prediksinya bila kegiatan ini dilakukan masif dan konsisten maka angka kejahatan di wilayah Kota Yogyakarta akan menurun khususnya di wilayah hukum Polsek Mergangsan," tandasnya

Tindakan yang telah dilakukan, lanjutnya adalah melakukan pantau monitoring dan pulbaket terhadap kegiatan tersebut. "Serta monitor perkembangan pasca kegiatan, berkoordinasi dengan pihak pengelola agar segera mengurus perizinannya dan membuat laporan secara tertulis pada pimpinan," jelasnya. **(Vin)-f**



KR-Istimewa

Buntut penganiayaan dan penusukan santri Ponpes Krapyak dilakukan razia miras dengan penutupan Outlet 23.